

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Diskominfo (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik) Kabupaten Bandung merupakan salah satu perangkat daerah yang berada di bawah Pemerintah Kabupaten Bandung. Di dalam organisasinya, terdapat divisi *e-government* yang memiliki salah satu tugas pokok, yaitu mengembangkan dan mengelola aplikasi terkait pemerintahan Kabupaten Bandung. Saat ini terdapat beberapa aplikasi yang butuh dikembangkan, salah satunya adalah aplikasi mengenai keterbukaan informasi publik Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Budi Darmawan, selaku Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* (kutipan terlampir pada Lampiran 2), saat ini keterbukaan informasi publik masih berupa fitur yang tergabung dalam web Pemerintah Kabupaten Bandung (www.bandungkab.go.id). Akibatnya, pengelolaan isi informasi publik tidak terpusat pada satu aplikasi, dan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang terbagi menjadi PPID Utama dan PPID Pembantu (berisi perangkat daerah) selaku pengelola informasi publik kurang leluasa untuk mengelola informasi publik secara *online*.

Saat ini, untuk memublikasikan informasi publik, PPID Pembantu dari setiap perangkat daerah Kabupaten Bandung (Inspektorat, Sekretariat, Dinas, Badan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan) mendatangi PPID Utama yang berada di Diskominfo Kabupaten Bandung selaku admin web Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal ini memakan waktu dan tenaga baik untuk PPID Pembantu maupun PPID Utama.

Selain itu, menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat tiga kategori informasi publik, yaitu Berkala, Setiap Saat, dan Serta Merta. Namun pada fitur KIP (Keterbukaan Informasi Publik) saat ini, informasi publik belum terbagi atas tiga kategori tersebut. Akibatnya, semua

informasi publik tergabung menjadi satu dan tidak memenuhi salah satu regulasi mengenai informasi publik.

Permohonan informasi publik oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi publik yang tidak terdapat pada web masih dilakukan secara *offline*. Akibatnya, masyarakat diharuskan mendatangi langsung PPID Utama yang terletak pada instansi Diskominfo Kabupaten Bandung untuk mengisi formulir permohonan. Setelah mengisi formulir, pemohon tidak langsung mendapatkan informasi di hari yang sama, dan tidak dapat memantau sejauh mana permohonan mereka diproses.

Disposisi formulir permohonan informasi publik dari masyarakat masih secara manual oleh PPID Utama dengan menyerahkan formulir permohonan informasi publik kepada PPID Pembantu di perangkat daerah terkait. Hal ini memakan waktu bagi PPID Utama untuk mengantarkan langsung formulir permohonan kepada PPID Pembantu terkait.

Tidak adanya galeri dan berita yang khusus memuat tentang informasi publik. Hal ini membuat masyarakat kurang diberi fasilitas untuk mengetahui lebih jauh mengenai keterbukaan informasi publik Kabupaten Bandung.

Oleh karena itu, dalam Proyek Akhir ini dibangun sebuah Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Kabupaten Bandung yang diharapkan dapat menjadi solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh PPID Utama dan PPID Pembantu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada sub Bab Latar Belakang, terdapat masalah yang diangkat dalam Proyek Akhir ini sebagai berikut.

1. Bagaimana memfasilitasi PPID Pembantu dalam memublikasikan informasi publik tanpa perlu mendatangi admin web Pemerintah Kabupaten Bandung dan pengguna dapat melihat informasi publik berdasarkan kategori?
2. Bagaimana memfasilitasi masyarakat agar dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID tanpa perlu mendatangi langsung instansi PPID terkait untuk mengisi formulir permohonan, serta masyarakat dapat mengetahui

sejauh mana permohonan mereka diproses berdasarkan disposisi permohonan yang dilakukan oleh PPID?

3. Bagaimana memfasilitasi masyarakat agar dapat mengetahui kegiatan dan berita terkini terkait informasi publik?

1.3 Tujuan

Untuk memberikan solusi bagi masalah-masalah yang telah dipaparkan pada sub Bab Rumusan Masalah, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari Proyek Akhir ini adalah membangun sebuah Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bandung yang dapat:

1. Memfasilitasi PPID Pembantu dalam memublikasikan informasi publik tanpa perlu mendatangi admin web Pemerintah Kabupaten Bandung dan pengguna dapat melihat informasi publik berdasarkan kategori.
2. Memfasilitasi masyarakat agar dapat mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID tanpa perlu mendatangi langsung instansi PPID terkait untuk mengisi formulir permohonan, serta masyarakat dapat mengetahui sejauh mana permohonan mereka diproses berdasarkan disposisi permohonan yang dilakukan oleh PPID.
3. Memfasilitasi masyarakat agar dapat mengetahui kegiatan dan berita terkini terkait informasi publik.

1.4 Batasan Masalah

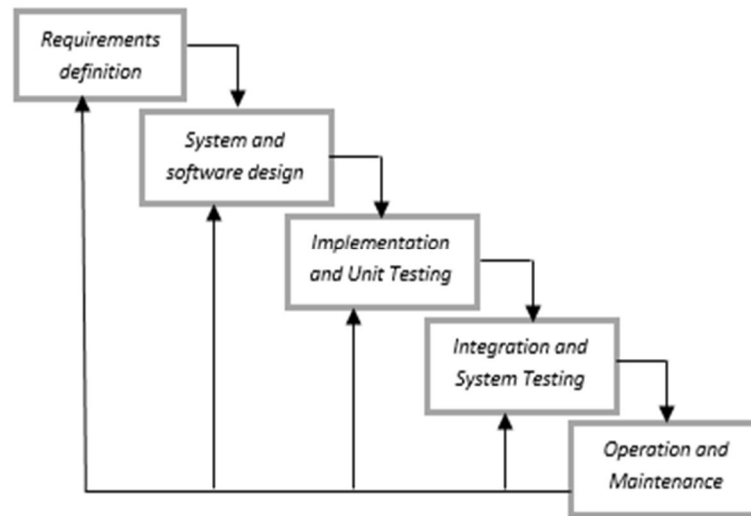
Agar pembahasan dalam Proyek Akhir ini tidak meluas dan melenceng dari tujuan, maka ditetapkan batasan-batasan sebagai berikut.

1. Aplikasi dikembangkan untuk digunakan oleh lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung dan masyarakat yang ingin mengajukan permohonan informasi publik.

2. Informasi Publik yang Dikecualikan, Pengajuan Keberatan terhadap Permohonan, dan Penyelesaian Sengketa Permohonan Informasi Publik tidak akan dibahas dalam buku ini.
3. Berdasarkan fitur Profil Perangkat Daerah pada web Pemerintah Kabupaten Bandung, PPID Pembantu terdapat dalam masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Bandung yang terdiri dari Inspektorat, 12 Bagian (Sekretariat Daerah), Sekretariat DPRD, 21 Dinas, 7 Badan (termasuk Satpol PP), 31 RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah), 31 Kecamatan.
4. *Dummy* akun PPID Pembantu yang terdapat pada aplikasi berjumlah enam perangkat daerah.
5. PPID Utama berada di Diskominfo (Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik) Kabupaten Bandung, namun Diskominfo juga memiliki PPID Pembantu dengan penanggung jawab berbeda dengan PPID Utama.
6. Aplikasi KIP Kabupaten Bandung tidak menyediakan fitur *chat* antarPPID dalam aplikasi.

1.5 Metode Pengerjaan

Pembuatan aplikasi ini menggunakan *Software Development Life Cycle* (SDLC) dengan metode Waterfall. Waterfall merupakan metode linier (*Sequent Linier*) yang prosesnya terurut [1]. Pemilihan Waterfall sebagai metode pengerjaan karena proses pengembangan yang berurut dan tidak saling tumpang tindih.



Gambar 1-1
Model Waterfall

Adapun tahapan-tahapan yang dilalui adalah sebagai berikut:

1. Requirement Definitions

Tahap ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna sehingga dapat diidentifikasi fitur apa saja yang akan dikembangkan di dalam aplikasi. Pada tahap ini dilakukan wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada staf bidang *e-government* untuk lebih memahami proses bisnis yang berjalan. Kutipan wawancara dapat dilihat pada lampiran 2.

b. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan dokumen, seperti SOP yang berkaitan dengan informasi publik, formulir pengajuan permohonan informasi publik yang dilampirkan pada lampiran 3 dan lampiran 4.

2. System and Software Design

Tahap ini bertujuan membuat rancangan dari aplikasi yang akan dibuat. Perancangan dilakukan dengan pendekatan *object-oriented* menggunakan UML. Adapun model-model yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a. *Use Case Diagram* dan *Use Case Scenario* untuk menggambarkan daftar pengguna, daftar fitur pada aplikasi dan interaksi antara keduanya.
- b. *Class Diagram* untuk menggambarkan hubungan antar *class* yang menyusun aplikasi.
- c. *Sequence Diagram* untuk menunjukkan interaksi antar *object*.
- d. *Entity Relationship Diagram* dan *Relationship Diagram* untuk menggambarkan rancangan logis, rancangan fisik dan struktur data-data yang tersimpan di dalam *database*.
- e. *Interface Mockup* untuk menggambarkan rancangan tampilan antarmuka aplikasi yang akan dilihat oleh pengguna.

3. Implementation and Unit Testing

Pada tahap ini akan dipastikan bahwa tiap fitur yang ada pada perangkat lunak berfungsi dengan baik. Uji fungsionalitas menggunakan metode *Black Box Testing* akan dilakukan untuk setiap fitur yang ada pada aplikasi.

4. Integration and System Testing

Setelah setiap fitur diuji secara terpisah pada tahap sebelumnya, maka pada tahap ini aplikasi secara utuh akan diuji oleh pengguna (*beta*) dalam sebuah *User Acceptance Test* (UAT). Setelah pengguna diminta mengisi kuesioner untuk menilai kelayakan aplikasi.

5. Operation and Maintenance

Proyek Akhir ini tidak sampai pada tahap *Operation and Maintenance*.

1.6 Jadwal Pengerjaan

Jadwal pengerjaan Proyek Akhir dijabarkan pada tabel 1-1 berikut.

Tabel 1- 1
Jadwal Pengerjaan

No	Nama Kegiatan	Durasi	September '18				Oktober '18				November '18				Juni '19		
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3
1	<i>Requirements Definition</i>	2 Pekan	■	■													
2	<i>System and Software Design</i>	5 Pekan			■	■	■	■	■								
3	<i>Implementation and Unit Testing</i>	4 Pekan								■	■	■	■				
4	<i>Integration and System Testing</i>	1 Pekan														■	■

Pada tabel 1-1, terdapat empat kegiatan yang dilakukan selama membangun Aplikasi Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Bandung berdasarkan metode penelitian Waterfall.